

## BAB II

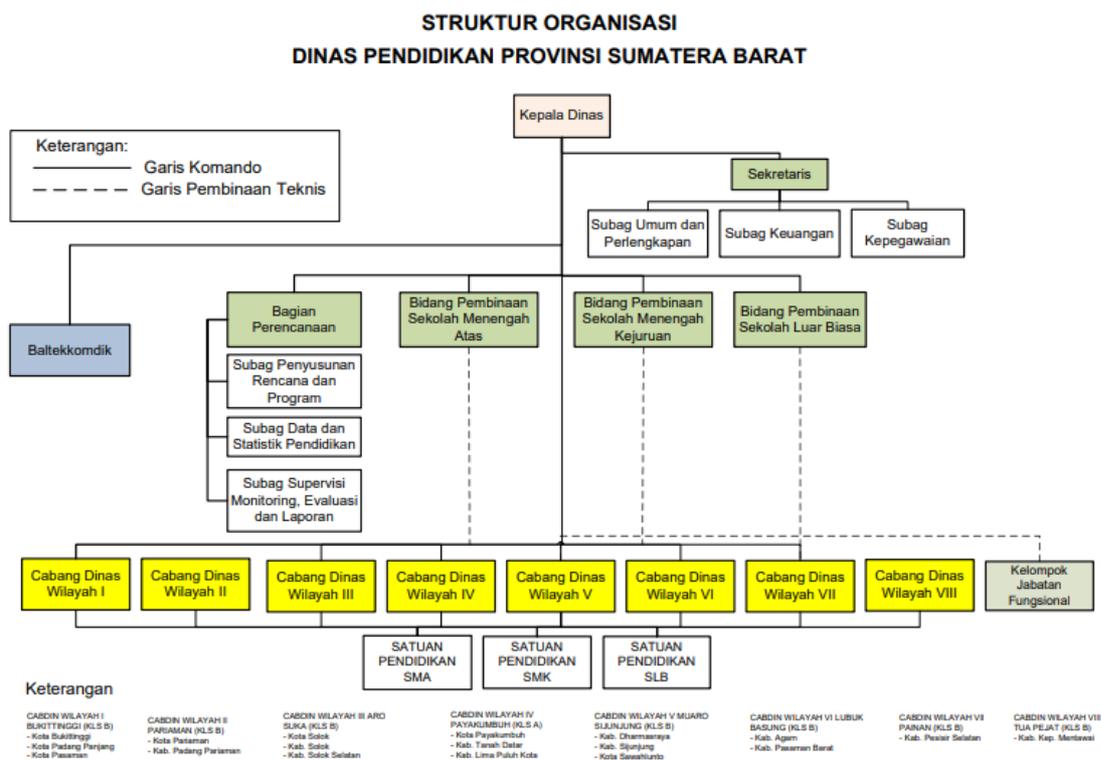
### GAMBARAN UMUM KONDISI PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

Pada bab II ini Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat dikemukakan kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini agar diperoleh gambaran secara umum berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembangunan di bidang pendidikan di Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.

#### 2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat.

Gambar 2.1.1  
Bagan Struktur Organisasi  
SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



## **2.2. Kondisi Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat**

Kondisi pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan (SK Gubernur No:78/Tahun 2016). Fungsi Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, lingkup provinsi dan kabupaten/Kota
4. Melaksanakan kesekretariatan dan perencanaan Dinas
5. Melakukan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB).
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsinya.

Kepala dinas pendidikan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Tugas kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
2. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang pendidikan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
4. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas dan merumuskan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
5. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pendidikan;
6. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Bagian Perencanaan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggung

Jawaban(LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi Kesekretariatan, Bagian Perencanaan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas,Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;

- 9 Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pendidikan;
- 10 Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- 11 Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 12 Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi ini kemudian organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di susun sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang ada agar organisasi dan kelembagaan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di komandoi oleh Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas yang dibantu oleh 4 (empat) bagian, satu cabang dinas, yakni:

1. bagian perencanaan,
2. bagian pembinaan sekolah menengah atas (SMA),
3. bagian pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK),
4. bagian pembinaan sekolah luar biasa (SLB),
5. cabang Dinas,
6. unit pelaksana teknis dinas (UPTD), dan
7. kelompok jabatan fungsional.
8. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yakni sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan sub bagian kepegawaian. Bagian Sekretariat memiliki 11 tugas pokok diantaranya melakukan pengelolaan urusan rumahtangga dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokoleran, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keamanan, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok ini sekretaris Dinas memiliki sejumlah fungsi yang dapat dilihat secara detil pada SK Gubernur No. 78/2016 tentang tugas pokok dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat 13 tugas pokok untuk sub bagian umum dan perlengkapan, 100 tugas pokok untuk sub bagian keuangan dan 10 tugas

pokok untuk sub bagian kepegawaian. Sehingga bagian Sekretariat memiliki 44 total tugas pokok.

Bagian Perencanaan terdiri dari 3 sub bagian yakni: sub bagian penyusunan rencana dan program, sub bagian data dan statistic pendidikan, dan sub bagian supervise, monitoring evaluasi dan laporan. Tugas pokok bagian perencanaan ini adalah menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan data pendidikan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian tugas pokok dan fungsi bagian perencanaan terdiri dari 14 tugas pokok ditambah dengan 8 tugas pokok untuk sub bagian penyusunan rencana, 14 tugas pokok untuk sub bagian data dan statistic dan 12 tugas pokok untuk sub bagian monitoring evaluasi dan laporan. Sehingga bagian perencanaan ini memiliki total tugas pokok adalah sebanyak 48 tugas pokok.

Adapun Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan pengkajian program kerja Kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
4. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengkajian anggaran belanja serta pengendalian administrasi belanja;
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penatausahaan kelembagaan;
6. Mengkoordinir perencanaan pemanfaatan, penatalaksanaan dan pertanggung jawaban barang inventaris milik daerah;
7. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
8. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan serta telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pembinaan sekolah menengah atas (SMA) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 8 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok, sehingga bagian pembinaan SMA ini memiliki 46 total tugas pokok.

Bagian pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 14 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok. Sehingga bagian pembinaan SMK ini memiliki 46 total tugas pokok.

Adapun tugas pokok pendidikan menengah adalah melaksanakan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan diibidang kurikulum dan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya ini, bidang pendidikan menengah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pembinaan sekolah luar biasa (SLB) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 14 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok. Sehingga bagian pembinaan SLB ini memiliki 46 total tugas pokok.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan sekolah luar biasa dan berkebutuhan khusus. Untuk melaksanan tugas pokoknya ini, maka bagian pembinaan sekolah luar biaya dan pendidikan berkebutuhan khusus ini berfungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas Dinas dibidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini maka Cabang Dinas memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
2. Pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Unit pelaksana teknis memiliki tugas pokok adalah melaksanakan sebahagian tugas teknis dan operasional dinas pendidikan provinsi Sumatera barat sesuai dengan bidangnya, dengan wilayah kerja kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari 4 bagian yakni: Sekretariat, Perencanaan, Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan SLB, Cabang Dinas dan ditambah dengan dua urusan yakni UPTD dan kelompok fungsional, sehingga keseluruhan terdapat 242 tugas pokok di bidang pelayanan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Apabila dikaitkan dengan tema pembangunan pendidikan nasional tahun 2014-2019 yang menjajapkan manusia Indonesia yang berdaya saing regional, kemudian dituangkan dalam visi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat; Terwujudnya sumberdaya manusia sumatera barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, maka perlu dipertimbangkan bagian dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan yang mengurus peningkatan mutu pendidikan dan kerjasama. Hal ini tentunya sesuai pula dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Upaya pemenuhan standar pendidikan nasional ini bagi pengelola SMA dan SMK tentunya menjadi suatu

keharusan. Oleh karena itu, Dinas pendidikan sebagai Pembina SMA dan SMK serta SLB tentunya perlu mengarahkan pembinaannya kepada pencapaian standar pendidikan nasional ini terutama mulai dari standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana pendidikan, bahkan sampai kepada standar pengelolaan pendidikan. Hal ini tentunya tidak dapat diberikan tugas dan tanggungjawab ini kepada lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) saja. Proses menuju kepada perolehan mutu pendidikan yang berstandar nasional tentunya bermula dari tata kelola sekolah itu sendiri. Kelembagaan LPMP lebih kepada upaya memperoleh sertifikasi sekolah karena telah menjalankan standar nasional pendidikan agar memiliki mutu nasional.

Tabel 2.2.1. Kondisi Bagian dan Sub Bagian Organisasi Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat

Organ/Bagian	Bagian/sub bagian	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Pokok	Fungsi	Jumlah Personal
Kepala Dinas	8	12	-	1
Sekretariat	3	44	4	
Perencanaan	3	48	4	
Pembinaan SMA	3	46	4	
Pembinaan SMK	3	46	4	
Pembinaan SLB	3	46	4	
UPTD	3	-		
Kelompok Fungsional	-	-		
Cabang Dinas	8	-		
Total	-	242	-	

Berdasarkan kepada table 2.2.1. terlihat bahwa tugas pokok dan rincian Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat seluruhnya adalah 242 butir dengan 8 bidang, diantara bidang yang paling banyak tugas pokoknya adalah bidang perencanaan. Sedangkan bidang pembinaan SMA, SMK dan SLB semua sama memiliki sebanyak 46 tugas pokok, yang terdiri dari 3 seksi yakni seksi kurikulum dan kesiswaan, seksi tenaga teknis dan seksi sarana dan prasarana sekolah. Sehingga terasa penting ditambahkan seksi peningkatan mutu dan kerjasama, agar pembinaan sekolah- sekolah yang ada diarahkan kepada peningkatan daya saing regional. Hal ini sejalan dengan misi yang ketiga dalam pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat yakni peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

### 2.3. Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sumberdaya dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari sumberdaya manusia, tenaga honorer, aset/modal dan unit usaha yang berjalan. Pada saat ini jumlah pegawai dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 281 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak satu orang, eselon III sebanyak 7 orang dan eselon IV terdiri dari 21 orang dan staf sebanyak 256 orang. Untuk lebih rinci dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan Struktural

No	SKPD dan UPT	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	1	5	17	197	216
2.	UPT BalteKondik		1	3	11	15
3.	UPT BLPT		0	0	0	0
4.	Pengawas Sekolah				20	20
	Jumlah	1	7	21	256	281

Perubahan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan telah dipisahkan dengan urusan kebudayaan yang telah menjadi dinas berdiri sendiri, sehingga telah merampingkan struktur organisasi sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016 dan perda nomor 8 tahun 2016 dinas pendidikan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan Dinas kebudayaan setelah terpisah dari dari pendidikan menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan tipe dinasnya B.

Jumlah pegawai berdasarkan kepada latar belakang pendidikan yang ditamatkan terlihat belum memadai, karena yang berpendidikan perguruan tinggi sangat kecil persentasenya

Tabel 2.3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1 s/d D4	SMA	SMP	SD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	0	41	89	7	78	0	1	216
2.	UPT Baltekomdik	0	6	5	0	4	0	0	15
3.	Pengawas Sekolah	0	10	10	0	0	0	0	20
	Jumlah	0	59	106	14	91	0	1	301

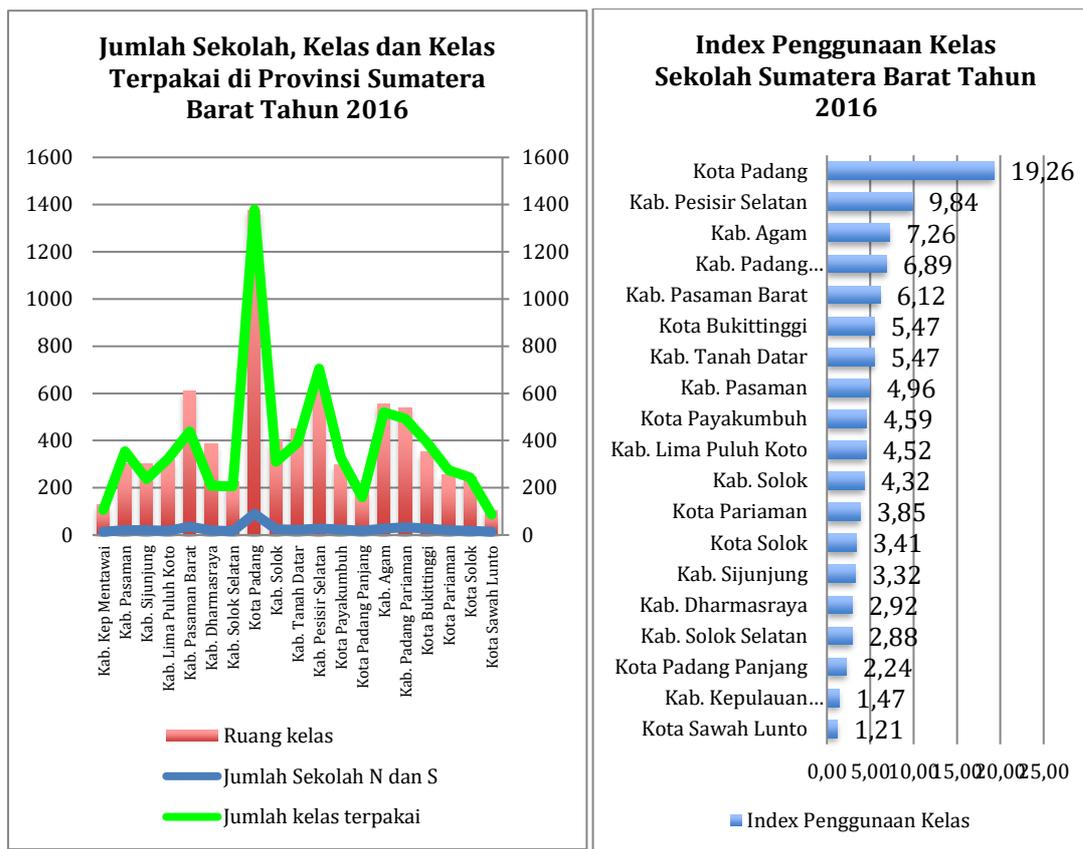
Berdasarkan kepada tabel 2.3.2 di atas terlihat bahwa potensi sumberdaya manusia dinas pendidikan Sumatera Barat sudah memadai dari segi kualitas pendidikan karena sebagian mereka berasal dari guru senior yang telah ditugas karyakan ke dinas pendidikan karena memiliki kinerja dan reputasi akademik yang baik. Sehingga dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada, telah memungkinkan dinas pendidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Selanjutnya aset dan modal yang dimiliki dan dikuasai oleh dinas pendidikan Sumatera Barat adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), jumlah guru dan tenaga kependidikan dari semua sekolah menengah di Sumatera Barat. Hal ini merupakan aset dan modal dalam membangun mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Pada gambar 2.3.1 di bawah menjelaskan bahwa jumlah sekolah dan jumlah local yang tersedia pada setiap kabupaten dan kota sudah mencukupi kebutuhan daya tampung siswa baru, karena jumlah ruang kelas dan kelas yang terpakai sudah sama, kecuali di kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya jumlah kelas terpakai masih jauh lebih rendah dari jumlah kelas yang ada.

Ketersediaan sekolah dengan jumlah kelasnya ini paling tinggi terdapat di Kota yakni Kota Padang yang mencapai jumlah sekolah sebanyak 90 negeri dan swasta dengan jumlah kelas total adalah sebanyak 1.377 lokal dan local yang terpakai 1.379 lokal dengan asumsi jumlah murid satu local 30 orang. Hal ini berarti sekolah di Kota Padang jumlah siswa per local melebihi 30 orang.

Berikutnya di kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah sekolah sebanyak 27 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pasaman Barat yang mencapai 35 buah dan Padang Pariaman sebanyak 33 buah sekolah, tetapi dua kabupaten terakhir kalah jumlah kelasnya dibandingkan dengan kabupaten Pesisir selatan yang mencapai 622 ruang kelas, sementara kabupaten Pasaman Barat sebesar 610 kelas dan kabupaten Padang Pariaman sebanyak 540 ruang kelas. Hal ini berarti daya tampung fisik sekolah di kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi di bandingkan dengan 2 kabupaten lainnya yang merupakan daerah yang memiliki ruang kelas terpakai paling tinggi di Sumatera Barat.

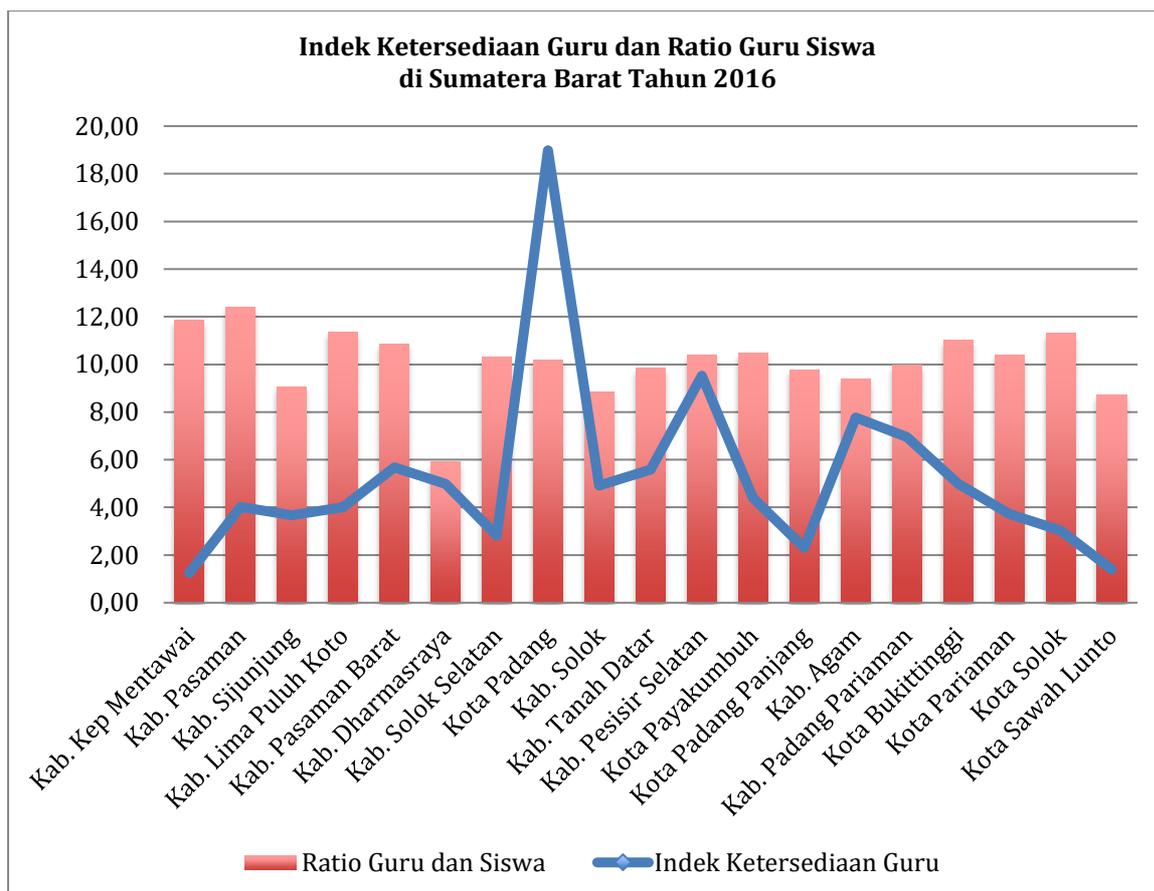


Gambar 2.3.1. Jumlah Sekolah dan Lokal Tersedia Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Indek penggunaan kelas optimal itu terdapat di Kota Padang sebesar 19,26 disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 9,84 dan Kabupaten Agam sebesar 7,26, sedangkan kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,12. Angka indek penggunaan kelas yang paling rendah terdapat pada Kota Sawahlunto sebesar 1,21.

Gambar 2.3.2. di bawah memberikan informasi bahwa ratio guru dengan siswa sudah memperlihatkan ratio ideal, ratio paling tinggi itu terdapat pada kabupaten Pasaman dan Kepulauan Mentawai, namun indek ketersediaan gurunya masih rendah. Apabila dikaitkan dengan tingkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) ternyata kedua kabupaten ini juga paling rendah diantara yang lainnya.

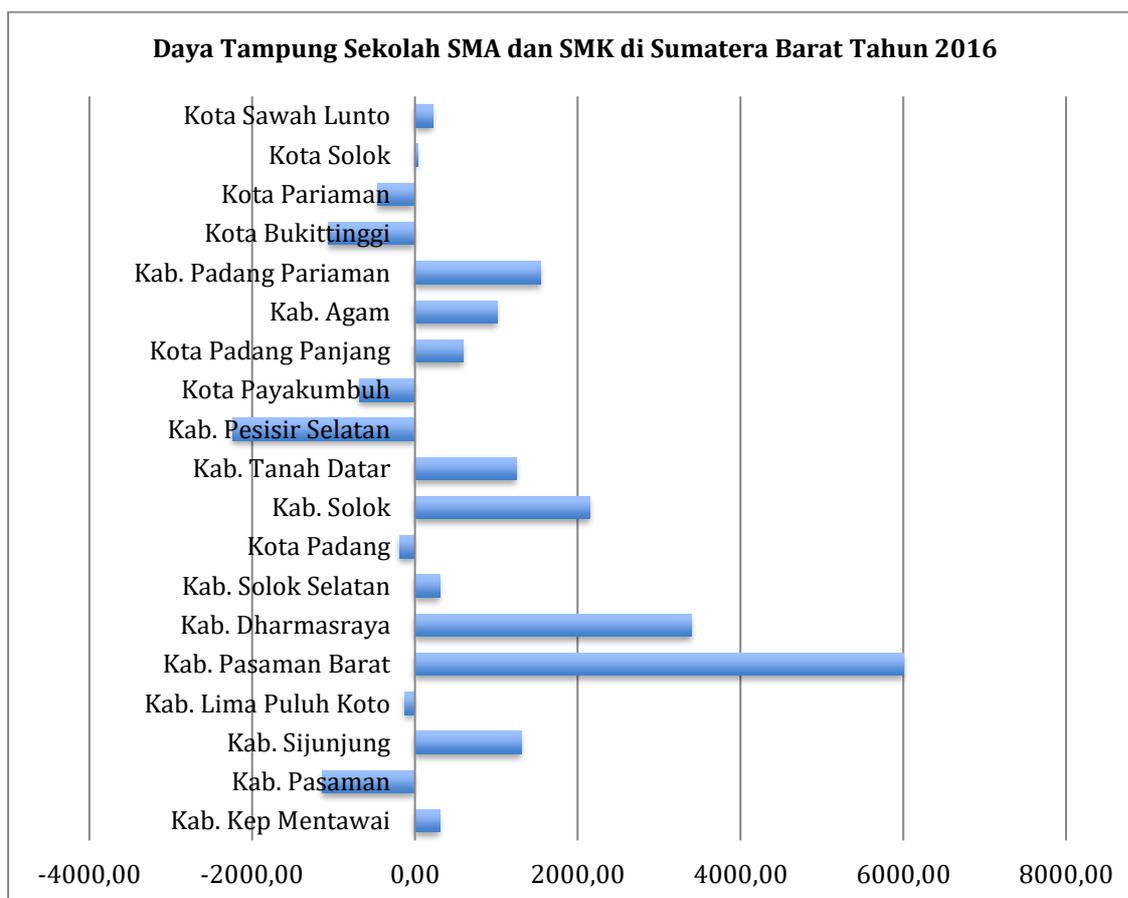
Ratio guru dan siswa paling rendah terdapat pada kabupaten Dharmasrya dan kabupaten Sijunjung, walaupun ketersediaan gurunya sudah menyamai ratio guru-siswanya, sehingga daya tampungnya sudah lebih besar dari kapasitas sekolah yang ada, dan angka partisipasi kasarnya untuk kabupaten dharmasrya sebesar 81,73 sudah di atas rata-rata APK provinsi Sumatera barat sebesar 80,46.



Gambar 2.3.2. Grafik Perbandingan Ratio Guru dan Siswa SMA/SMK dan Indeks Ketersediaan Guru SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat

Disamping itu, indeks ketersediaan guru paling tinggi itu terdapat pada Kota Padang yang mencapai 18,98 dan paling rendah di kabupaten Kepulauan Mentawai yang mencapai 1,24 dan Kota Sawahlunto mencapai 1,40. Semakin rendahnya angka indeks tentunya kemampuan daya tampung sekolah untuk menerima murid baru semakin rendah pula, itulah sebabnya kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto tingkat APK SMA/SMKnya sebesar 79,77 masih di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat. Artinya faktor rendahnya angka partisipasi kasar juga disebabkan oleh ketersediaan guru yang belum mencukupi di wilayah ini, disamping daya tampung yang memperlihatkan tingkat ketersediaan lokal yang masih rendah.

Gambar 2.3.3. di bawah memperlihatkan tingkat daya tampung sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat tahun 2016 yang dihitung dari jumlah local yang tersedia, jumlah local yang terpakai dan jumlah sekolah yang ada pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terdapat 7 kabupaten dan Kota yang masih mengalami kekurangan daya tampungnya yakni 4 kota terdiri dari Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Sedangkan terdapat 3 kabupaten yakni kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan 50 Kota.



Gambar 2.3.3. Gambaran Tingkat Daya Tampung SMA dan SMK di Sumatera Barat Tahun 2016

Pada wilayah kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kekurangan daya tampung yang paling tinggi bersama kota Bukittinggi, ternyata ini masalah tingginya jumlah siswa yang masuk ke sekolah karena kedua wilayah ini angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) nya sudah jauh di atas rata-rata APK dan APM SMA dan SMK provinsi Sumatera Barat. Sementara indeks ketersediaan gurunya masih rendah. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa apabila daya tampungnya masih rendah sedangkan angka partisipasi kasar dan murninya sudah di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat, maka wilayah ini mengalami masalah kekurangan guru. Sebaliknya apabila daya tampungnya sudah melebihi jumlah kelas yang tersedia, sedangkan angka APK dan APMnya sudah di atas rata-rata Sumatera Barat, maka ini masalahnya terletak pada kekurangan sarana fisik sekolah seperti local yang tersedia tidak sebandingnya dengan tingginya potensi usia sekolah yang akan bersekolah di SMA dan SMK.

## 2.4. Kinerja Layanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat

Kinerja layanan Dinas pendidikan mengacu kepada tatakelola sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah khusus (SMK) dan sekolah luar biasa yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari ruangan belajar, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio dan semua para sarana yang mendukung kepada penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang menyenangkan, seperti lingkungan fisik sekolah yang sejuk, nyaman, asri bahkan lingkungan social sekolah yang mendukung kepada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran, empati, rasa solidaritas dan sikap menunjung tinggi kebinekaan, sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Disamping itu, kinerja dinas pendidikan juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan selama periode 2011-2015.

Tabel 2.4.1. Pencapaian kinerja Pelayann dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	PENDIDIKAN FORMAL																	
1	SD																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	95	98%	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.10	98.38	98.81	98.99	99.18	104.36	103.56	102.93	02.05	101.20
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,4%	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	92%	90.12	90.29	91.12	91.75	92.00	73.50	75.60	77.46	85.00	88.60	81.56	83.73	85.01	92.64	96.30
	(d) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	91.65	92.75	94.16	96.89	98.00	86.50	86.90	87.06	87.10	87.17	94.38	93.69	92.46	89.90	88.95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(e) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.11	92.79	93.17	94.25	95.00	31.59	31.80	-	-	-	34.67	34.27	0.00	0.00	0.00
	(f) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	95	100%	96.51	97.89	98.11	99.14	100.00	95.60	96.10	96.91	98.16	98.92	99.06	98.17	98.78	99.01	98.92
	(g) Jml Siswa per Kls	30-40	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(h) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	90.50	91.00	91.25	93.50	98.90	98.37	97.85	97.07	98.42
	(i) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMP	95	99%	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	01.05	100.57
2	SMP																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.64	90.79	92.22	99.27	99.28	98.51	98.68	99.16	05.61	104.51

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0.4%	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	88.00	88.76	88.88	88.92	90.40	96.70	96.48	95.57	94.60	95.16
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90%	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(e) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	93.00	95.00	96.00	97.00	98.00	93.00	95.00	96.00	97.00	81.00	100.00	100.00	100.00	00.00	82.65
	(f) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	86.63	90.50	-	-	-	95.20	98.37	0.00	0.00	0.00
	(g) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75
	(h) Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMA	70	99%	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	01.28	96.53
3	SMA																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	90	92%	90.25	90.50	91.10	91.60	92.00	68.12	71.38	74.07	81.97	82.05	75.48	78.87	81.31	89.49	89.18
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,6 %	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	31.43	1.58
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	37.30	100.00	100.00	100.00	00.00	39.26
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(e) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(f) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	98 %	92.00	94.00	95.00	97.00	98.00	92.61	92.61	-	-	-	100.66	98.52	0.00	0.00	0.00
	(g) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(h) Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	0.95	100.00	100.00	100.00	00.00	1.00
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	25	27 %	22.00	25.00	30.00	31.00	35.00	25.52	25.97	26.05	37.00	41.32	116.00	103.88	86.83	19.35	118.06
4	SMK																	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(a) Angka Putus Sekolah	<1	0.6 %	0.90	0.80	0.70	0.65	0.01	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	110.00	127.14	41.54	9500.00
	(b) Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	62.00	63.00	63.50	64.00	65.00	68.13	68.48	68.28	68.09	68.42
	(c) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	80.00	81.50	82.00	82.40	83.00	97.56	97.02	95.35	93.64	92.22
	(d) Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.00	90.00	90.60	91.00	93.60	97.80	97.83	97.42	96.81	98.53
	(e) Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.95	92.95	-	-	-	101.04	101.03	0.00	0.00	0.00
	(f) Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(g) Jml Siswa per Kls	30-40	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(h) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	20	20 %	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Lulusan yg diterima di Dunia Kerja sesuai Keahlian	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
B	PENDIDIKAN NON FORMAL																	
1	Pendidikan Kesetaraan																	
	(a) Bisa membaca dan menulis	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70
	(b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 Th.	<7	4 %	5.00	4.80	4.60	4.40	4.00	1.50	1.78	0.83	0.65	0.41	30.00	37.08	18.04	14.77	10.25

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	© Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 Th.	<30	15 %	20.00	19.00	18.00	16.00	15.00	9.43	7.97	7.89	7.56	7.32	47.15	41.95	43.83	47.25	48.80
2	Program Paket A																	
	(a) Peserta Paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	85	90 %	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	82.00	83.60	84.70	85.50	86.00	95.35	96.09	96.25	96.07	95.56
	(b) Peserta didik Paket A yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	5.70	4.50	77.78	100.00	100.00	95.00	90.00
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	96.00	97.30	98.20	93.00	94.67	100.79	101.34	101.35	95.53	96.60

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(d) Jml peserta paket A yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	84.60	86.00	86.70	87.90	89.55	88.82	89.57	89.48	90.29	91.38
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket A yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	98.90	98.91	98.92	99.47	99.68
3	Paket B																	
	(a) Pesrta Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	90	92 %	90.25	90.82	91.04	91.70	92.00	83.50	83.60	84.75	85.95	86.88	92.52	92.05	93.09	93.73	94.43

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(b)	Peserta didik Paket B yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	6.50	6.70	5.60	4.00	77.78	81.25	95.71	93.33	80.00
©	Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	85.20	87.30	88.20	83.00	84.67	103.90	103.93	102.56	94.32	94.08
(d)	Jml peserta paket B yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	50	60 %	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	50.00	52.60	53.80	54.00	58.75	96.15	97.41	96.07	93.10	97.92
(e)	Pemenuhan jml tutar Paket B yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
(f)	Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	03.89	105.22

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Program Paket C																	
	(a) Peserta Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	70	75 %	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	70.00	72.30	73.50	73.60	74.89	98.59	100.42	100.68	99.46	99.85
	(b) Peserta didik Paket C yg tdk aktif	<5	3 %	4.70	4.20	3.90	3.30	3.00	4.00	4.10	3.60	3.15	2.95	85.11	97.62	92.31	95.45	98.33
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	85 %	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	80.20	81.60	82.00	82.50	80.37	99.01	99.51	98.80	98.21	94.55
	(d) Jml peserta paket C yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	10	15	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	7.50	8.76	9.00	8.80	10.50	68.18	73.00	69.23	62.86	70.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket C yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	03.89	105.22
5	Pendidikan Taman Kanak-Kanak																	
	(a) Jml anak usia 4-6 yg mengikuti program TK	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	(b) Guru yg layak mendidik TK sesuai dg standar kompetensi Nasional	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	© TK yg memiliki sarpras bermain	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(d) TK yg telah menerapkan manajemen berbasis sekolah	60	70 %	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
	Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 73 Th 2009)																	
1	Angka Rata-rata lama bersekolah	7.4	8.40	9.35	9.70	10.05	8.78	8.88	8.57	8.60	8.63	8.71	8.91	91.66	88.66	85.87	99.20	100.34
2	Angka melek huruf	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92
3	Pembinaan guru jenjang SD	35%	40.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	35.00	36.00	37.50	38.00	39.00	97.22	97.30	98.68	97.44	97.50
4	Pembinaan guru jenjang SMP	46%	50.00	47.00	48.00	49.00	49.50	50.00	46.00	46.70	47.00	48.76	49.67	97.87	97.29	95.92	98.51	99.34
5	Pembinaan guru jenjang SMA/SMK	37%	40.00	37.98	38.25	38.89	39.25	40.00	35.00	36.20	37.60	38.90	39.58	92.15	94.64	96.68	99.11	98.95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	APM SD/MI/Paket A	95%	98.00	99.67	99.75	100.00	100.00	100.00	94.46	94.49	94.48	99.56	99.57	94.77	94.73	94.48	99.56	99.57
7	APM SMP/MTs/Paket B	79%	80.00	78.80	80.35	82.90	83.45	85.00	75.43	80.90	80.95	81.12	81.15	95.72	100.68	97.65	97.21	95.47
8	APM SMA/SMK/MA/Paket C	72%	73.00	62.50	67.50	72.50	75.00	80.00	50.34	69.67	69.88	73.08	73.10	80.54	103.21	96.39	97.44	91.38
9	Angka Putus sekolah SD	<1	0.40	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
10	Angka Putus sekolah SMP	<1	0.40	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
11	Angka Putus sekolah SMA/SMK	<1	0.60	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	31.43	1.58
12	Angka kelulusan SD	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	99.53	96.72	97.99	97.99	96.07	104.49	100.74	101.14	00.66	97.04
13	Angka kelulusan SMP	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	95.16	97.56	99.02	99.95	99.84	99.91	101.61	102.20	02.67	100.85
14	Angka kelulusan SMA/SMK	97%	98.00	97.21	97.32	97.49	97.78	98.00	95.25	99.40	85.39	99.60	99.95	97.98	102.14	87.59	01.86	101.99
15	Angka Melanjutkan dari SD ka SMP	95%	99.00	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	01.05	100.57

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Angka Melanjutkan dari SMP ka SMA/SMK	70%	99.00	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	01.28	96.53
17	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	92%	95.00	92.50	93.00	93.50	94.00	95.00	83.12	87.37	86.88	87.35	91.01	89.86	93.95	92.92	92.93	95.80

## 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas

### Pendidikan

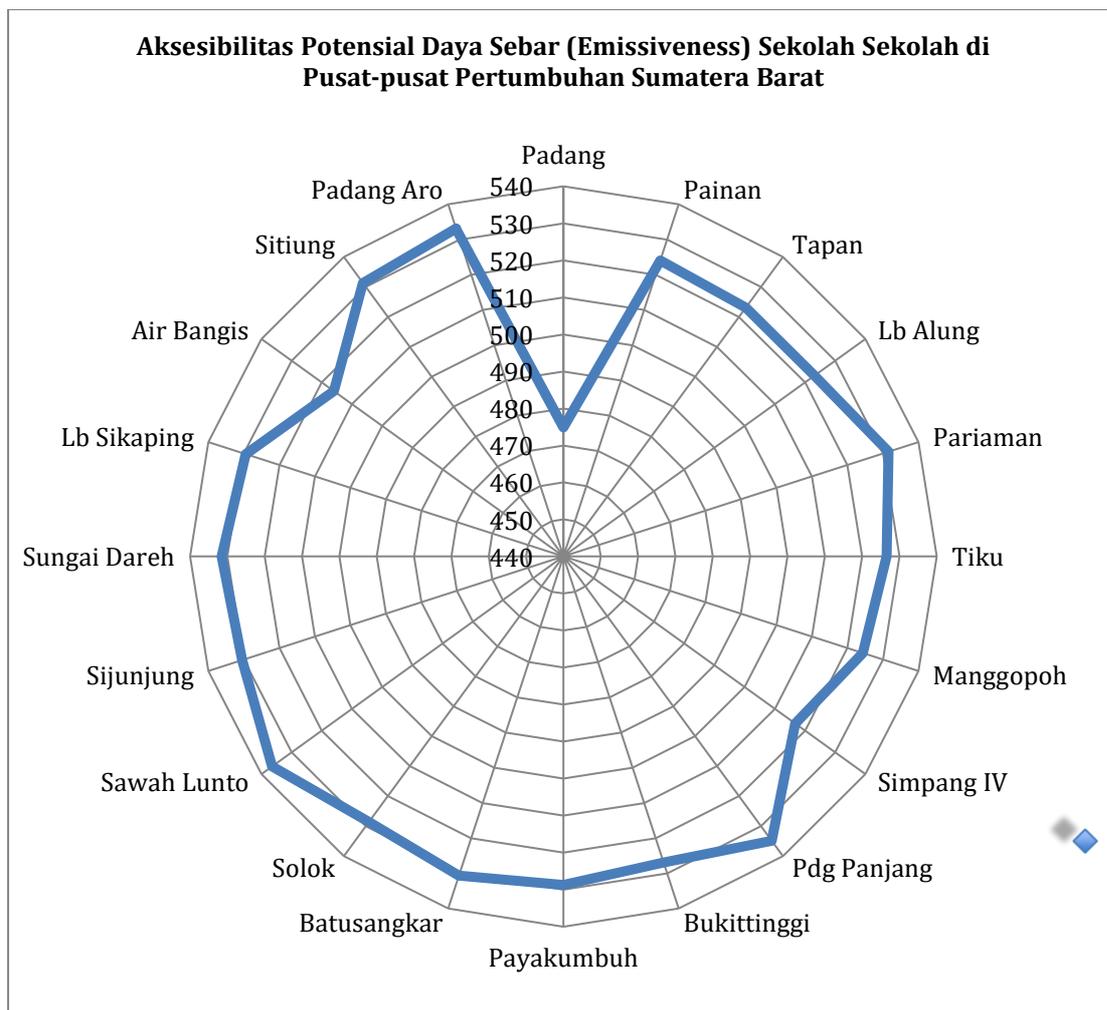
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan berdasarkan pilar penyelenggaraan pendidikan yang telah dicanangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan selama ini. Yakni pilar peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, tantangan dan peluang terhadap kondisi guru dan tenaga kependidikan. Tantangan terhadap kondisi efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, tantangan dan peluang penyelenggaraan pendidikan berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan Sumatera Barat.

#### 2.5.1. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan

Kondisi akses dan pemerataan layanan pendidikan berkaitan dengan keterjangkauan pendidikan SMA dan SMK oleh penduduk usia sekolah, termasuk juga oleh rumah tangga penduduk yang miskin. Dengan demikian aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas pendidikan dengan pemerataan kesempatan memasuki sekolah/non diskriminasi, aksesibilitas fisik (kemudahan jangkauan secara geografis), aksesibilitas ekonomi, karakteristik system pelayanan, dan pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Pada bagian ini akan ditemukan permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat selama ini, dengan menganalisis data-data yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik, ekonomi dan seterusnya itu.

Aksesibilitas potensial merupakan teknik analisis yang menggunakan jarak lokasi antar pusat pertumbuhan dalam satu wilayah dengan kegiatan atau pelayanan. Analisis ini

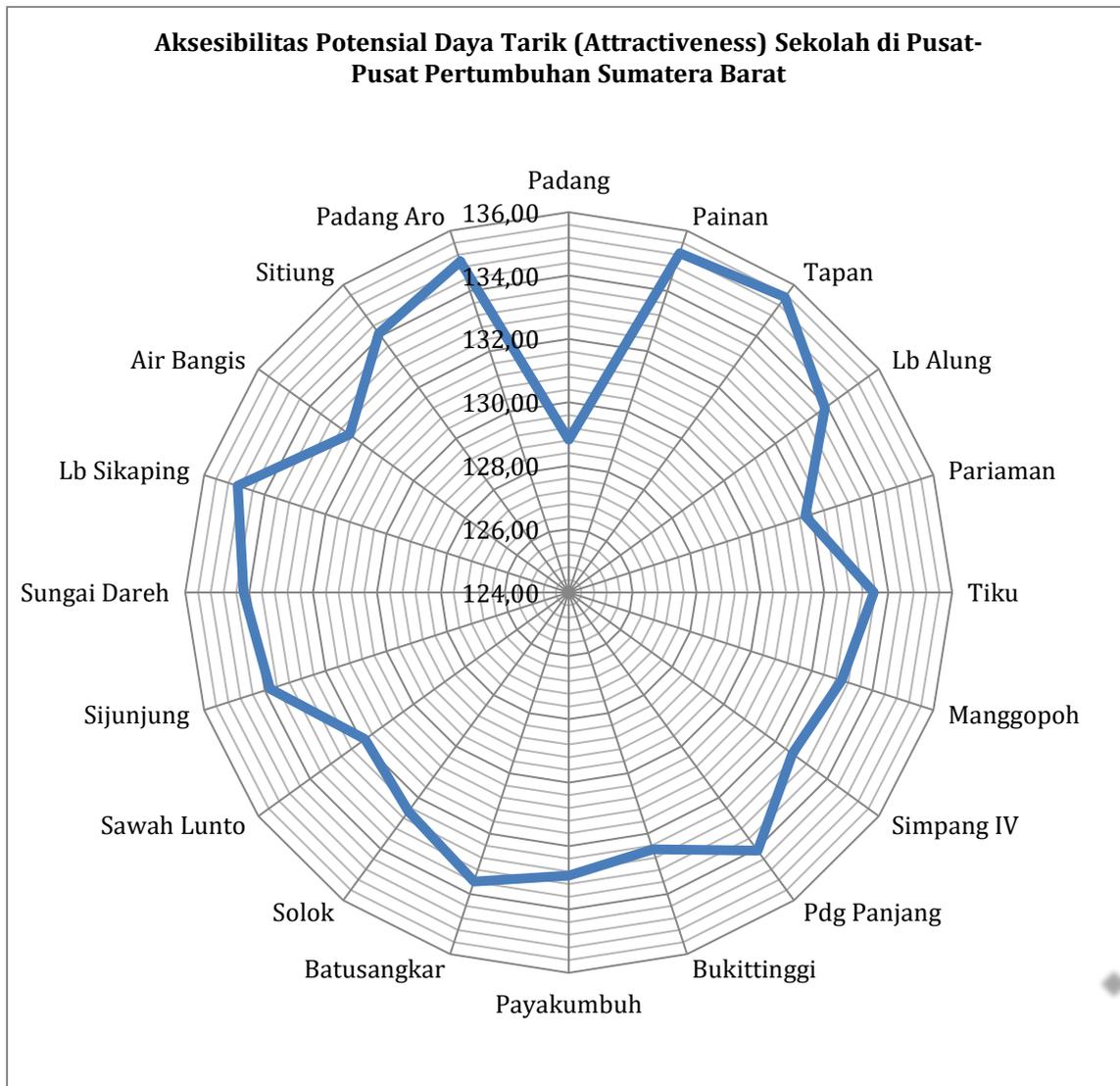
dikembangkan untuk mempertimbangkan kemampuan aktifitas suatu wilayah dalam hal ini fungsi pelayanan pendidikan yakni sekolah terhadap kebutuhan pendidikan bagi penduduk usia sekolah; dalam hal ini adalah penduduk usia sekolah SMA/SMK di pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat, yang diindeks dengan jarak lokasi dari fungsi pelayanan itu dibangun. Semakin besar nilai matrik Aksesibilitas potensial (A(P), semakin sulit akses. Sebaliknya semakin rendah nilai matrik A(P) makin mudah akses. Nilai matrik aksesibilitas potensial menggambarkan kemampuan daya tarik fungsi pelayanan terhadap daerah sekitarnya sehubungan jarak lokasi dan kemampuan daya sebar fungsi pelayanan terhadap daerah hinterlandnya.



Gambar 2.5.1.1 Kondisi Aksesibilitas Potensial Sekolah –Sekolah di Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera Barat

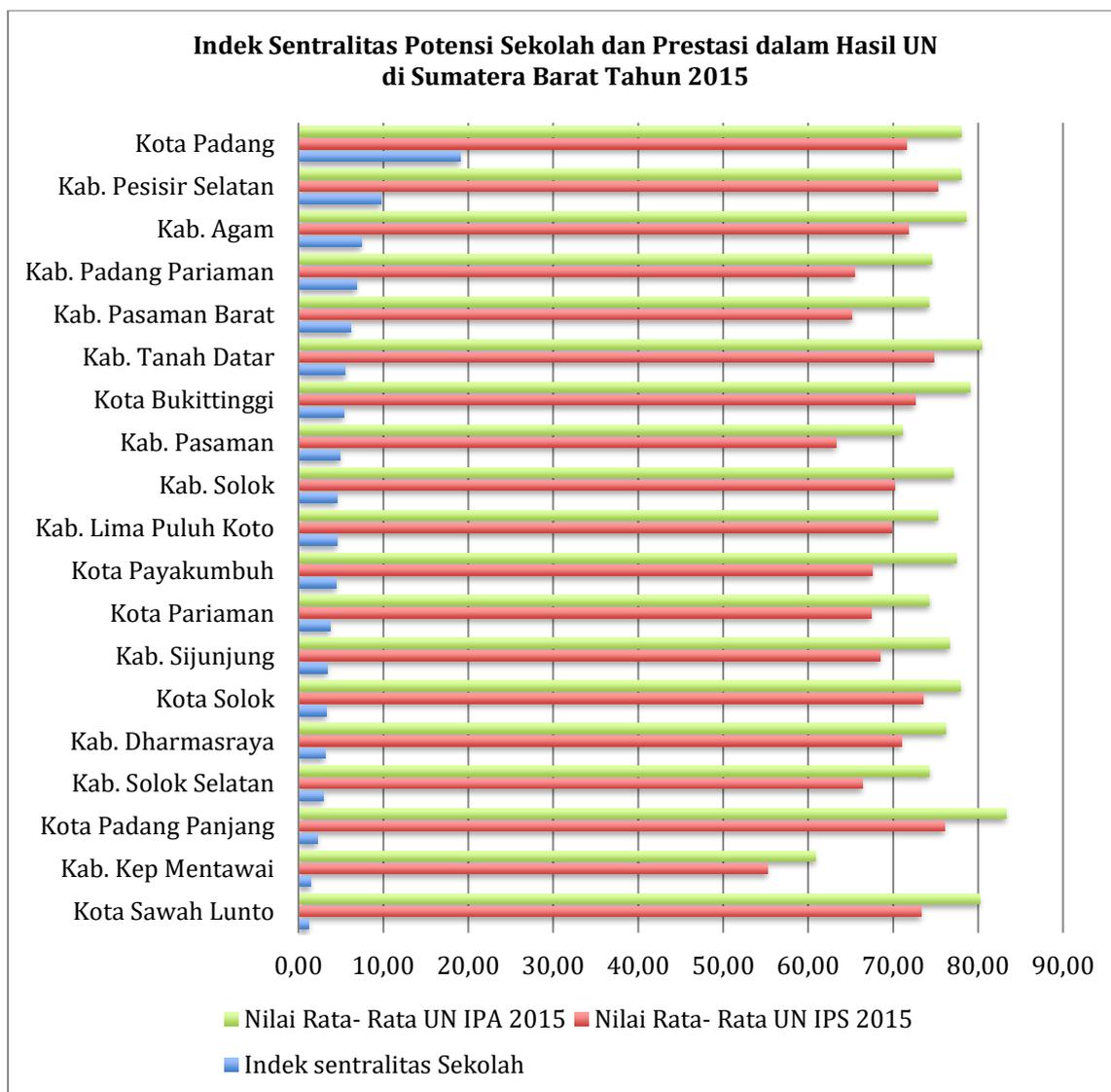
Pada gambar 2.5.1.1.dan 2.5.1.2. memberikan informasi bahwa sekolah-sekolah di Kota Padang memiliki daya sebar dan daya tarik yang lebih baik karena mampu menarik daerah-daerah hinterlandnya untuk dapat menikmati fungsi pelayanan sekolah-sekolah yang ada. Sedangkan sekolah-sekolah yang ada di pusat pertumbuhan Sawahlunto,

Padangpanjang, dan Padang Aro memiliki daya sebar pelayanan sekolah yang rendah, karena hanya melayani daerah sekitarnya saja.



Gambar 2.5.1.2. Kondisi aksesibilitas potensial daya tarik sekolah-sekolah pada pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Barat

Gambar 2.5.1.3. melukiskan bahwa indeksentralitas fungsi pelayanan pendidikan yang memberikan informasi tentang kondisi aksesibilitas karakteristik system pelayanan sekolah dalam pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Indek yang paling tinggi menggambarkan semakin lengkapnya fungsi pelayanan sekolah yang dapat diakses oleh penduduk, diantara fungsi pelayanan itu adalah jumlah sekolah, jumlah local, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah laboran, jumlah pustakawan, jumlah pengawas dan tenaga administrasi sekolah.



Gambar 2.5.1.3. Indek Sentralitas Potensi sekolah dan Hasil Capaian UN Tahun 2015

Berdasarkan kepada kompleksitas fungsi pelayanan pendidikan, yang mencerminkan aksesibilitas, maka Kota padang memiliki indek fungsi pelayanan sekolah yang paling tinggi sebesar 19.10, disusul oleh kabupaten Pesisir Selatan dengan indek sebesar 9,73 dan kabupaten Agam sebesar 7.40. indek sentralitas fungsi pelayanan pendidikan yang paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.26, kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1.43 dan Kota Padangpanjang sebesar 2.22.

Apabila di sandingkan dengan prestasi dalam perolehan nilai ujian nasional dengan asumsi semakin lengkap fungsi pelayanan tentunya kualitas juga semakin lebih baik, tetapi ternyata belum terbukti, rangking nilai UN IPS yang paling tinggi itu diraih oleh sekolah SMA/SMK Kota Padangpanjang dengan nilai rata-rata sebesar 76.01 dan nilai UN IPA nya sebesar 83.34. demikian juga untuk ota Sawahlunto perolehan nilai rata-rata UNnya untuk IPS sebesar 73.3 dan UN IPA sebesar 80.18 yang merupakan rangking tiga tertinggi di

Sumatera Barat. Untuk Kota Padang sendiri yang memiliki kecukupan fungsi pelayanan pendidikan nilai UN IPSnya sebesar 71.56 dan UN IPA sebesar 78.01 berada di bawah Kota sawahlunto dan Padangpanjang.

Artinya, kecukupan fungsi pelayanan pendidikan dan keterjangkauan terhadap akses pendidikan ternyata belum linear dengan prestasi dan kualitas pendidikan yang diraih. Tentunya, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya upaya peningkatan suasana pembelajaran di sekolah yang mendukung kepada pencapaian hasil nilai UN yang lebih baik. Upaya peningkatan kualitas suasana pembelajaran ini, memiliki banyak factor yang mempengaruhinya, mulai dari ketersediaan fasilitas yang menunjang kepada suasana pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kualitas guru dan ketersediaan prasarana yang mendukung seperti akses kepada IPTEK pendidikan seperti internet, dan sumber media informasi lainnya sebagai sumber-sumber belajar selain dari guru dan sekolah. Tentunya factor yang dominan mempengaruhi pencapaian perolehan nilai UN yang terbaik ini memerlukan suatu kajian tersendiri pula, mengingat banyaknya factor yang akan mempengaruhinya.

### **2.5.2. Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan**

Kondisi guru dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah dan kualifikasinya, sebarannya, dan tingkat kecukupannya. Permasalahan kondisi guru yang dilihat bukan saja jumlahnya tetapi sebarannya setiap sekolah dan keberimbangan bidang studi guru dengan bidang mata pelajaran yang diasuhnya. Terdapat indikasi bahwa guru banyak yang mengajar di luar kompetensi pokoknya, karena mengejar beban 24 jam pelajaran sebagai syarat memperoleh hak sertifikasi guru.

Jumlah guru di provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebanyak 21.372 orang yang tersebar pada 489 sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta. Rata-rata jumlah guru pada setiap sekolah adalah sebanyak 43-44 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran yang ada hal ini sudah mencukupi, tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah kelas dan rombongan belajar yang ada jumlah ini tentunya masih belum mencukupi. Terjadi penumpukan guru pada mata pelajaran tertentu, terutama pada mata pelajaran IPA dan IPS, Teknik, tetapi kekurangan pada guru bidang studi khusus seperti informatika dan keterampilan keprigelan dan kecakapan hidup seperti menggambar, menari, melukis, akuntan, statistic dan keterampilan lainnya yang relevan dengan dunia kerja.

Disamping ketidak seimbangan ketersediaan guru dalam kompetensi yang dilekatkan kepada lulusan SMA dan SMK juga ketidakseimbangan ketersediaan guru dalam sebaran setiap sekolah di wilayah kabupaten dan kota. Ketersediaan guru dan sekolah tertumpuk pada pusat pertumbuhan Kota Padang dengan jumlah sekolahnya sebanyak 2186 sekolah negeri dan swasta dengan jumlah guru 4057 orang dengan rata-rata

ketersediaan guru setiap sekolah adalah 45 orang ini berada jauh di atas rata-rata ketersediaan guru setiap sekolah di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5.2.1. Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah –Sekolah Sumatera barat

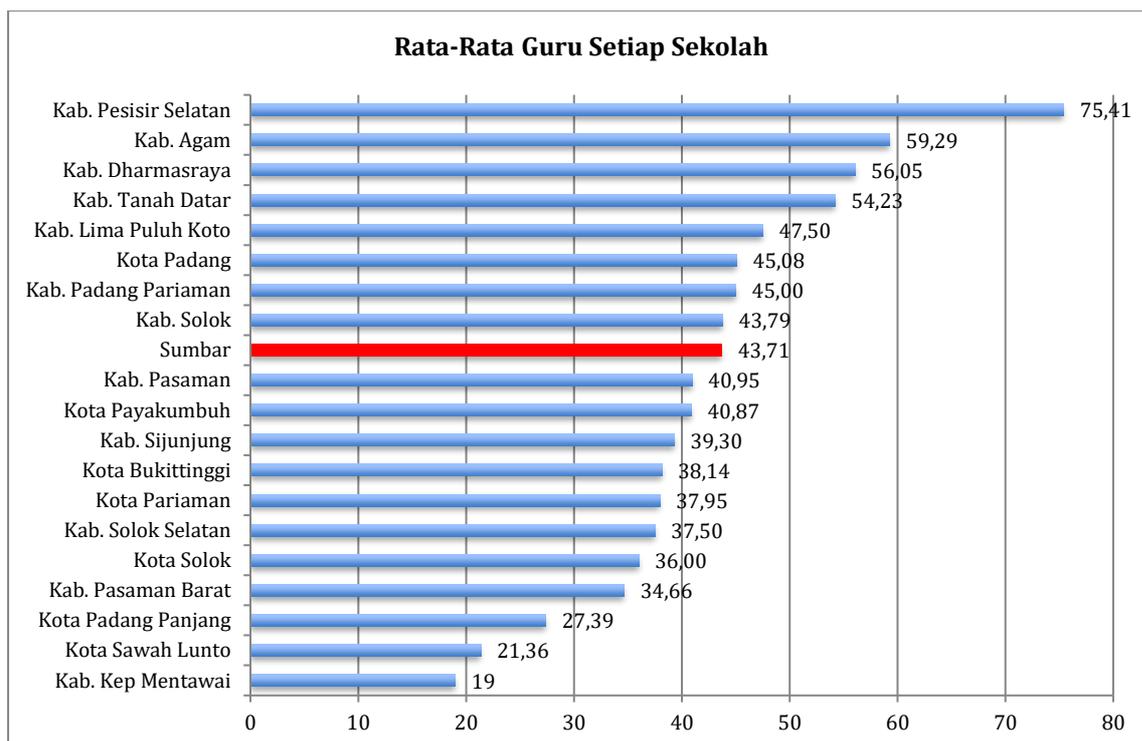
Kabupaten dan Kota	Jumlah guru	Persentase guru	Rata-Rata Ketersediaan guru per Sekolah	Jumlah Tenaga Kependidikan	Persentase	Rata-rata
Kab. Kep Mentawai	266	1.24	19	109	0.87	7.79
Kab. Pasaman	860	4.02	40.95	716	5.69	34.10
Kab. Sijunjung	786	3.68	39.30	632	5.02	31.60
Kab. Lima Puluh Koto	855	4.00	47.50	772	6.14	42.89
Kab. Pasaman Barat	1213	5.68	34.66	725	5.76	20.71
Kab. Dharmasraya	1065	4.98	56.05	297	2.36	15.63
Kab. Solok Selatan	600	2.81	37.50	509	4.05	31.81
Kota Padang	4057	18.98	45.08	2186	17.38	24.29
Kab. Solok	1051	4.92	43.79	922	7.33	38.42
Kab. Tanah Datar	1193	5.58	54.23	799	6.35	36.32
Kab. Pesisir Selatan	2036	9.53	75.41	1158	9.21	42.89
Kota Payakumbuh	940	4.40	40.87	303	2.41	13.17
Kota Padang Panjang	493	2.31	27.39	182	1.45	10.11
Kab. Agam	1660	7.77	59.29	1175	9.34	41.96
Kab. Padang Pariaman	1485	6.95	45.00	886	7.04	26.85

Kota Bukittinggi	1068	5.00	38.14	431	3.43	15.39
Kota Pariaman	797	3.73	37.95	269	2.14	12.81
Kota Solok	648	3.03	36.00	283	2.25	15.72
Kota Sawahlunto	299	1.40	21.36	225	1.79	16.07
Sumbar	21372	100	43.71	12579	100	25.72

Tabel 2.5.2.1. menjelaskan juga bagaimana perbandingan ketersediaan guru dan sebarannya pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Persentase guru paling tinggi terdapat pada Kota Padang sebanyak 18,98 persen dari total guru di Sumatera Barat, disusul oleh Pesisir Selatan sebesar 9,53 persen dan kabupaten Agam sebesar 7.77 persen. Sedangkan porsi guru paling kecil itu terdapat pada kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya sebesar 1,24 persen dan Kota Sawahlunto sebesar 1,40 persen. Meskipun Kota Padang, dan Agam memiliki porsi terbesar ketersediaan guru, namun rata-rata ketersediaan guru setiap sekolah itu yang mencerminkan ratio guru setiap sekolah paling tinggi pada kabupaten Pesisir Selatan sebesar 75,41 persen, disusul oleh kabupaten Agam sebesar 59,29 persen. Sedangkan ratio guru setiap sekolah paling rendah terdapat pada kota Sawahlunto sebesar 21,36 dan Kota Padangpanjang sebesar 27,39 persen.

Tenaga kependidikan terdiri dari laboran, pustakawan dan administrator sekolah. Persentase jumlah rata rata tenaga kependidikan paling besar terdapat pada kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 42,89 persen disusul oleh kabupaten Agam sebesar 41,96 persen. Meskipun demikian porsi paling banyak itu untuk tenaga kependidikan paling besar tetap ada di Kota Padang sebesar 17,38 persen dan porsi terkecil itu ada di kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,87 persen, dan Kota Padangpanjang sebesar 1,45 persen.

Data – data ini memperlihatkan bahwa provinsi Sumatera Barat masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan terutama untuk laboran dan pustakawan, serta guru bantu bengkel yang memiliki keahlian khusus pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Apabila dirinci ketersediaan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan keahlian khususnya tentunya kekurangan ini semakin banyak terasa, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian keunggulan dan daya saing pendidikan di level regional , tentunya hal ini sangat mengkuatirkan sekali.



Gambar 2.5.2.1. Rata-Rata Guru Setiap Sekolah Menurut Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat

Gambar 2.5.2.1. menjelaskan bahwa terdapat 11 wilayah kabupaten dan kota yang rata-rata jumlah guru nya masih di bawah provinsi dan siasanya sebanyak 8 kabupaten dan Kota rata-rata ketersediaan gurunya sudah diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan, Agam dan Dharmasraya memiliki persentase ketersediaan guru setiap sekolah yang sudah cukup baik, berada diatas rata-rata provinsi yang mencapaia 43,79 persen, meskipun jika dibandingkan dengan ratio guru-siswanya sebesar 1:10,39. Terdapat 3 kabupaten dan Kota yang memiliki rata-rata ketersediaan gurunya paling rendah yakni kabupaten kepulauan Mentawai sebesar 19.00 dan Kota sawahlunto sebesar 21,36 persen, disusul Kota Padangpanjang sebesar 27,39 persen.

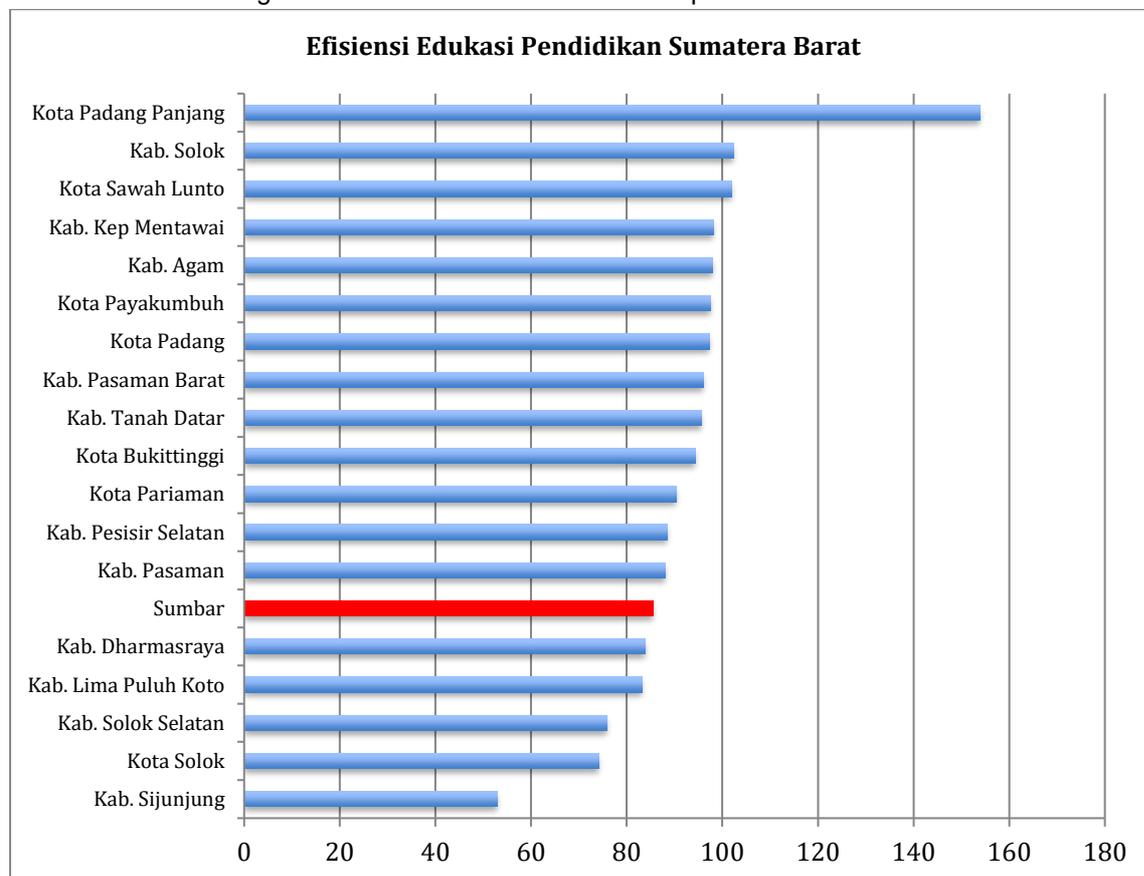
Data-data ketersediaan guru diatas memperlihatkan bahwa ketersediaan guru per kelas dan sekolah sudah sangat memadai. Namun ketersediaan guru per bidang studi dan keahlian khusus untuk mengembangkan kompetensi siswa untuk dapat bersaing di level regional ASEAN, tentunya sangat terasa belum memadai. Penyediaan guru untuk bidang keahlian khusus di SMA seperti guru laboran fisika, guru laboran kimia, dan guru laboran biologi, guru bengkel, guru studio yang memiliki keahlian secara khusus untuk melekatkan kemampuan khusus kepada siswa agar memiliki kecakapan khusus yang dibutuhkan di tengah masyarakat terutama juga bagi SMK tentunya sangat terasa belum disiapkan sejak sekarang. Kebanyak guru yang ada bidang keahliannya adalah bidang-bidang ilmu umum seperti IPS, IPA dengan variannya, tetapi guru dengan keahlian khusus atau keterampilan khusus sebagai bekal bagi life skill siswa untuk masuk ke perguruan tinggi dan ke dunia

kerja bagi SMK tentunya masih belum cukup tersedia dengan memadai. Oleh karena itu, pengadaan guru dan peningkatan kualitas guru, haruslah diarahkan kepada peningkatan keahlian khusus ini yang *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional maupun ASEAN. Hal ini dikemukakan bahwa bukankah tidak semua lulusan SMA di setting melanjutkan ke perguruan tinggi, sebahagian dari mereka akan terjun ke dunia kerja pada level operator dan petugas administrasi di sekolah. Sehingga bagi mereka juga diperlukan keterampilan khusus agar memudahkan pekerjaan mereka nantinya.

### 2.5.3. Kondisi Efisiensi dan Efektifitas Tata Kelola Layanan Pendidikan

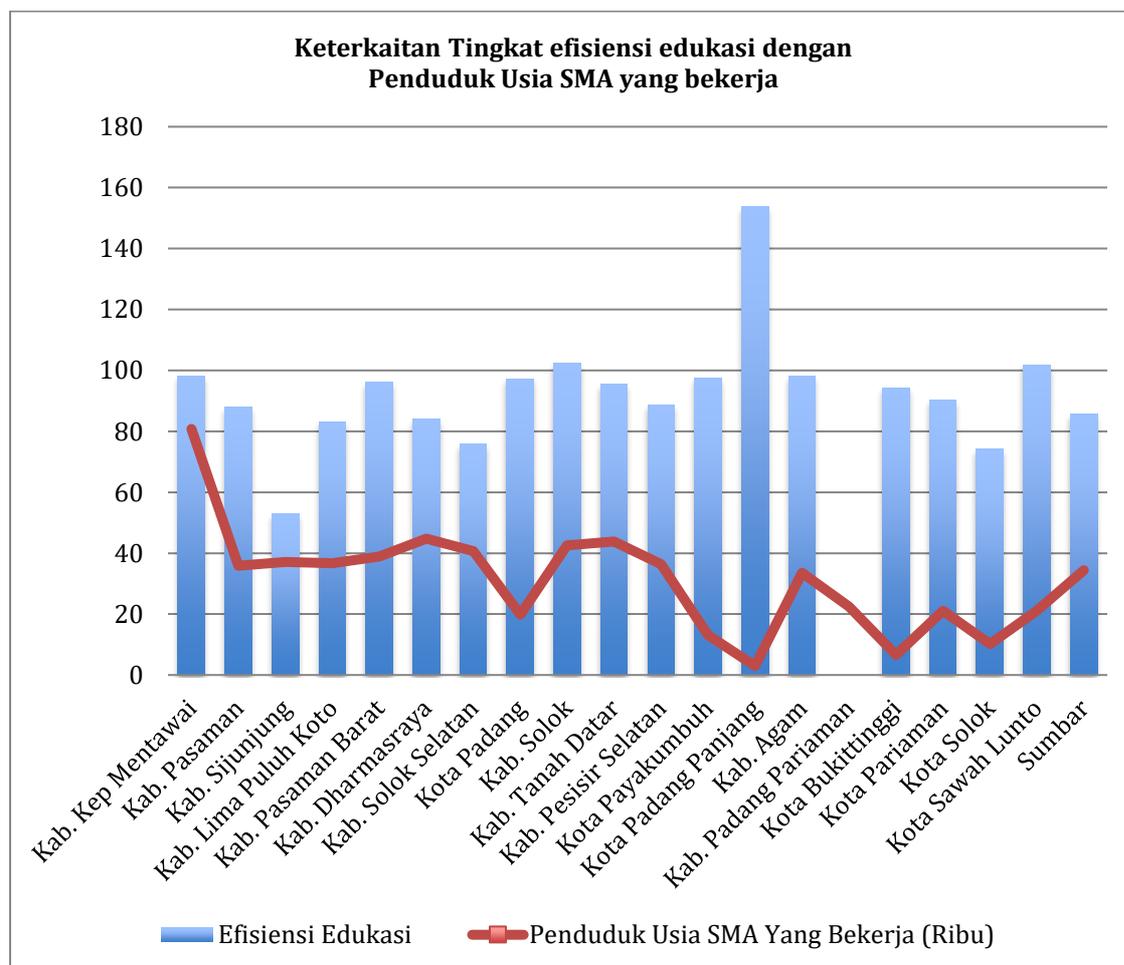
Kondisi efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan berkaitan dengan seberapa perolehan maksimum dari suatu kegiatan layanan pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan dalam tatakelola layanan pendidikan itu. Efektifitas tata kelola layanan pendidikan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Efisiensi edukasi merupakan ratio antara jumlah siswa baru dengan jumlah siswa yang tamat. Semakin mendekati angka seratus berarti semakin efisien. Artinya, jumlah siswa yang masuk sebanding dengan jumlah siswa yang keluar atau yang lulus. Table berikut menggambarkan tingkat efisiensi edukasi sekolah-sekolah di kabupaten dan kota .

Tabel 2.5.3.1. Tingkat Efisiensi edukasi Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat



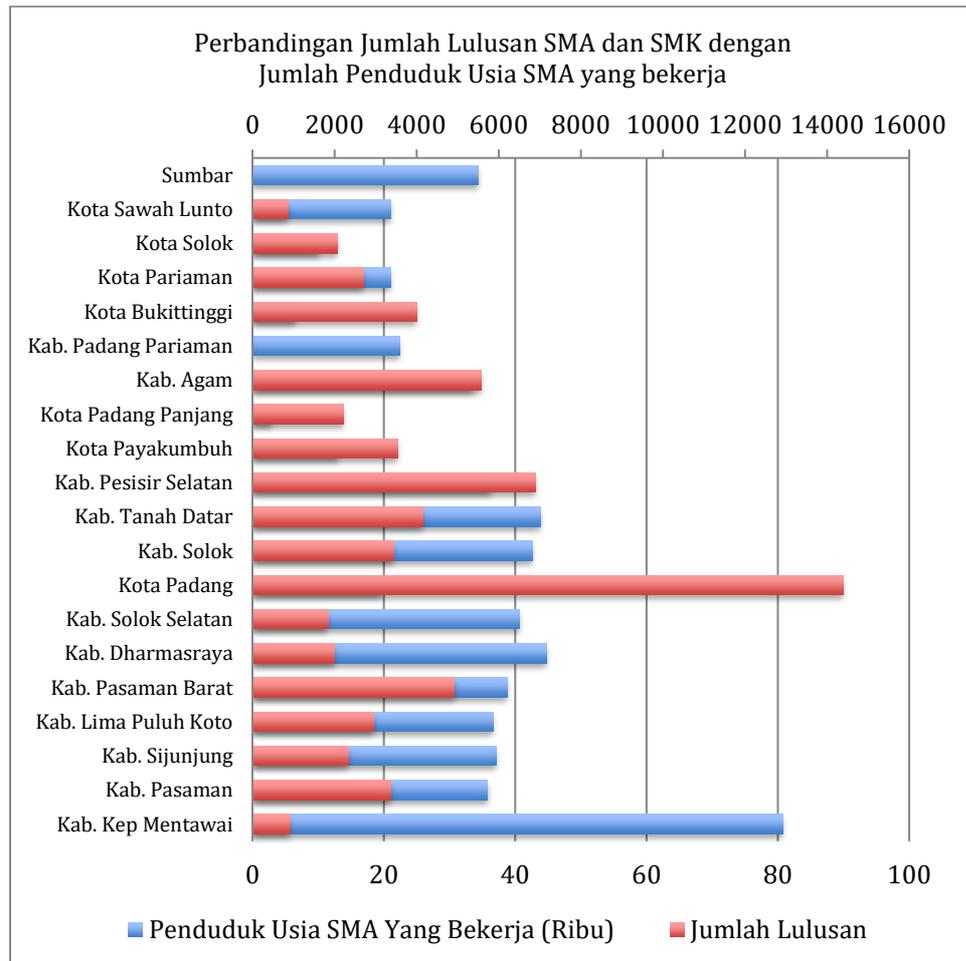
Tabel 2.5.3.1. di atas mengemukakan bahwa tingkat efisiensi edukasi sekolah-sekolah SMA dan SMK di provinsi Sumatera Barat baru mencapai 85,5%, masih terdapat sekitar 15 persen sisanya siswa belum tamat tepat waktu, sehingga angka ini menggambarkan tingkat kualitas pendidikan SMA dan SMK di Sumatera Barat. Diantara sembilanbelas kabupaten dan kota, maka masih terdapat 5 kabupaten dan kota yang tingkat efisiensi edukasinya berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni kabupaten Dharmasraya, Lima puluh kota, Sijunjung, Solok Selatan dan Kota solok.

Rendahnya angka efisiensi edukasi ini disamping menggambarkan tingkat kualitas pendidikan juga menggambarkan efisiensi tatakelola pendidikan dalam menerima dan menamatkan siswanya. Semakin tinggi tingkat efisiensi edukasi SMA dan SMK, maka semakin rendah pula jumlah penduduk usia SMA dan SMK yang berkerja. Sebaliknya, apabila angka efisiensi edukasi pendidikan SMA dan SMK semakin rendah, maka semakin banyak pula penduduk usia SMA dan SMK yang berkerja.



Gambar 2.5.3.2. Gambar Grafik Perbandingan Tingkat Efisiensi Edukasi Pendidikan SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia SMA yang berkerja.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa kota Padangpanjang memiliki tingkat efisiensi pendidikan paling tinggi yakni 153,79 namun juga memiliki jumlah penduduk usia sekolah SMA yang berkerja paling rendah. Berbeda dengan kabupaten kepulauan Mentawai, memiliki angka efisiensi edukasi sebesar 98,07 tetapi jumlah penduduk usia SMA yang berkerja juga tinggi pula.



Gambar 2.5.3.2. Perbandingan Jumlah Lulusan SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia SMA yang Bekerja di Sumatera Barat

Gambar 2.5.3.2. di atas mengungkapkan bahwa Kabupaten dan kota yang memiliki jumlah lulusan SMA yang dominan yang berarti tingkat efektifitas tatakelola layanan pendidikannya lebih baik dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang memiliki penduduk usia SMA yang berkerja sedangkan lulusan SMA dan SMKnya lebih kecil, seperti halnya kabupaten kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto. Sehingga terdapat dua kemungkinan penyebabnya; pertama karena jumlah penduduk usia SMA ini masih kecil persentasenya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih untuk masuk ke dunia kerja. Kenyataannya APK PT di kedua wilayah ini memang masih rendah. Kedua, angka putus sekolah memang masih tinggi dan mereka memasuki lapangan pekerjaan dengan lebih

awal, walaupun belum memiliki ijazah SMA dan SMK. Wilayah kabupaten dan kota yang memiliki efektifitas tatakelola layanan pendidikan yang baik itu adalah yang lulusan SMA dan SMKnya lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMA yang berkerja adalah terdapat pada kota Padang, Pesisir Selatan, Agam dan Kota Bukittinggi dan lainnya. Artinya semakin efektif tatakelola layanan pendidikan suatu daerah, maka semakin lebih besar jumlah lulusan SMAnya, dan semakin tinggi pula APK PTnya. Sebaliknya pada wilayah pendidikannya yang belum efektif, semakin kecil jumlah lulusan SMAnya semakin tinggi jumlah penduduk usia SMA yang berkerja dan semakin rendah pula APK PTnya.

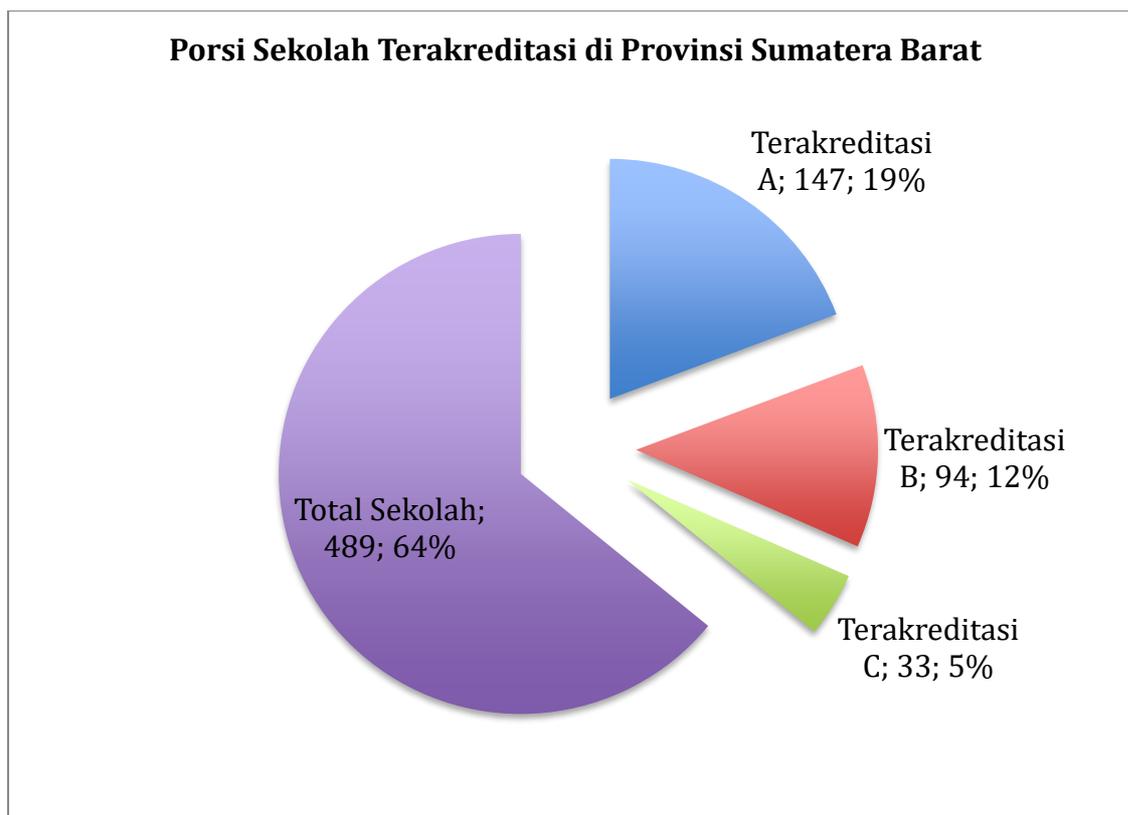
#### **2.5.4. Kondisi Implementasi pendidikan karakter layanan pendidikan**

Pendidikan karakter layanan pendidikan merupakan konsep pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang terbentuk sebagai hasil dari proses internalisasi berbagai nilai-nilai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak peserta didik di lingkungan social dan alamiahnya (Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen dikmen Kemendiknas, 2016). Sehingga dalam membangun budaya dan karakter bangsa Indonesia, maka dirumuskan 18 nilai dan sikap yang menjadi landasan karakter siswa sebagai luaran dari layanan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai itu adalah:

1. relegius
2. jujur
3. toleransi
4. disiplin
5. kerja keras
6. kreatif
7. mandiri
8. demokratis
9. rasa ingin tahu
10. semangat kebangsaan
11. cinta tanah air
12. menghargai prestasi
13. bersahabat/komunikatif
14. cinta damai
15. gemar membaca
16. peduli lingkungan
17. peduli social
18. tanggung jawab

Semua nilai karakter kepribadian bangsa ini harus tercermin dalam standar kelulusan (SKL) siswa di SMA dan SMK di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat dilakukan apabila sekolah SMA dan SMK sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 di setiap sekolahnya. Sehingga pada setiap mata pelajaran sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter unggul di atas pada system pembelajarannya, yang pada gilirannya akan membentuk dan melahirkan budaya sekolahnya sendiri. Setiap sekolah harus mampu mengembangkan karakternya dari ke delapan belas nilai-nilai inti budaya bangsa di atas dengan mengembangkan nilai-nilai karakter masing-masing melalui proses pembelajaran baik yang bersifat kurikulum maupun yang non kurikuler.

Data empiris untuk upaya sekolah mengimplementasikan pendidikan karakter akan terlihat dari usaha untuk memenuhi standar mutu pendidikan nasional (SNP) yang dibuktikan dengan terpenuhinya standar pendidikan nasional yang diawali dengan penetapan SKL, standar isi, standar proses, sarana dan prasarana, standar guru tenaga pendidik, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di sekolah melalui pengajuan akreditasi sekolah, sehingga diyakini, apabila sekolah sudah mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat akreditasi A dan B bahkan C, berarti pendidikan karakter sudah mulai dibangun dan dikembangkan di sekolah ini melalui perumusan nilai-nilai inti yang dianut oleh warga sekolah menuju sekolah berkualitas dan unggul. Berikut gambaran sekolah sekolah yang telah melakukan akreditasi untuk standar mutu pendidikannya di Sumatera Barat.



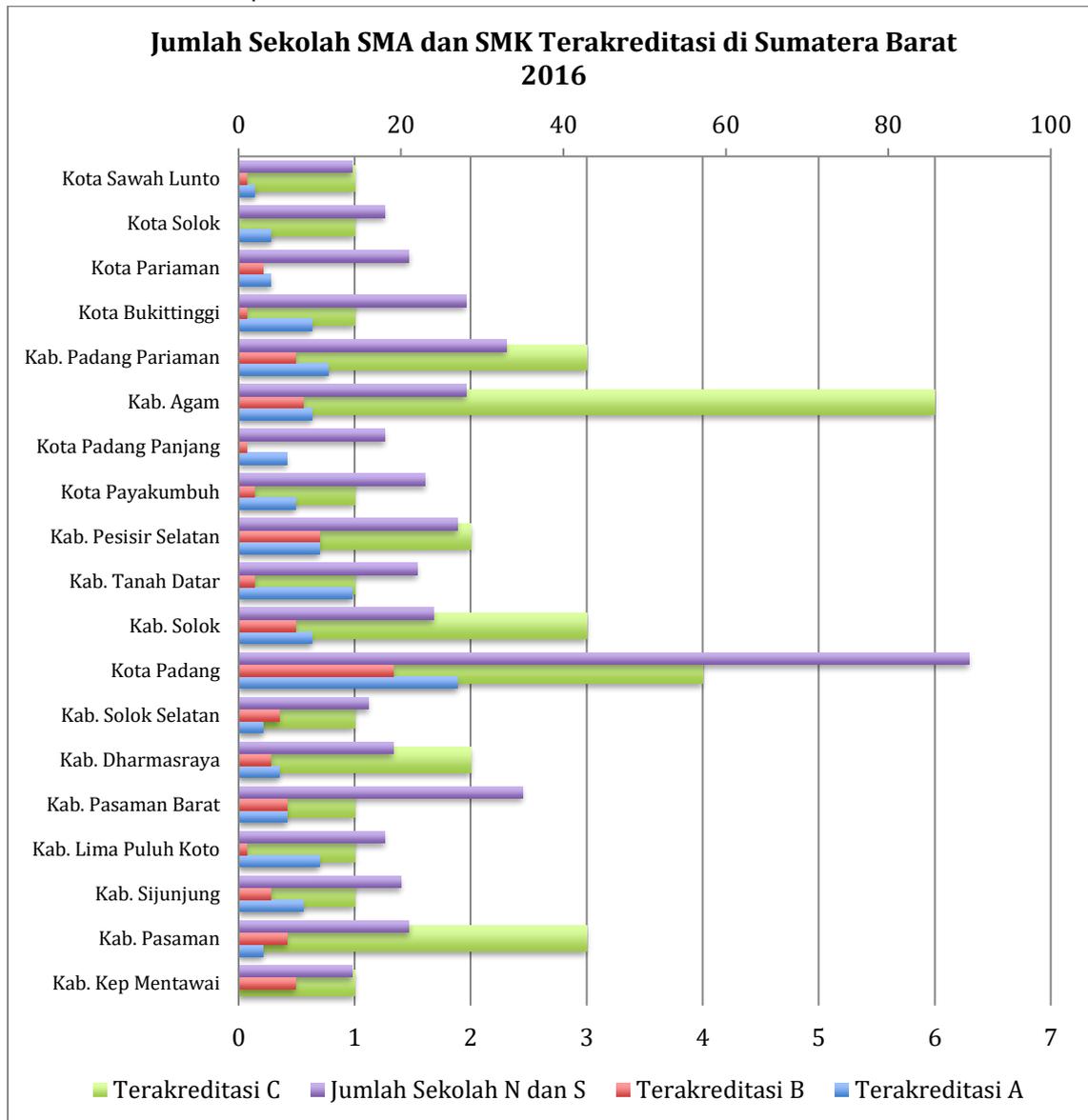
Gambar 2.5.4.1. Perbandingan Peringkat Akreditasi Sekolah SMA dan SMK di Sumatera Barat

Gambar 2.5.4.1. di atas memberikan informasi bahwa dari sebanyak 489 jumlah sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat tahun 2016 yang sudah memperoleh nilai akreditasi sekolah “A” adalah sebanyak 147 sekolah atau 19% dari sekolah yang ada. Sedangkan sekolah yang memperoleh peringkat akreditasi “B” adalah sebanyak 94 sekolah SMA dan SMK atau sebesar 12% dari sekolah yang ada, dan terakhir jumlah sekolah yang memperoleh peringkat akreditasi “C” berjumlah 33 sekolah atau hanya 5 % dari total sekolah yang ada. Secara keseluruhan sekolah SMA dan SMK yang sudah memperoleh peringkat akreditasi sebesar 36 % sisanya sebanyak 64% sekolah di Sumatera Barat belum mengajukan dan memperoleh peringkat akreditasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang belum mengajukan status akreditasi ini belum tersusun dan terencana dengan baik.

Alasan kenapa sekolah belum mengajukan akreditasi pada saat ditanya pada saat observasi lapangan dikatakan karena mereka belum mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya. Penyebab utamanya belum mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya disebabkan karena belum terpenuhinya standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama kemampuan guru untuk mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum 2013 yang masih belum memadai, ketersediaan sarana dan

prasarana pendukung pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik di sekolah seperti system informasi an teknologi yang belum siap, dan seterusnya.

Tabel 2.5.4.1. Jumlah Sekolah Terakreditasi menurut Peringkat akreditasi berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2016



Tabel 2.5.4.1. di atas memberikan informasi bahwa Kota Padang memiliki jumlah sekolah yang terakreditasi “A” dan “B” paling banyak masing-masing adalah sebanyak 27 sekolah terakreditasi “A” dan 19 sekolah terakreditasi “B”. disusul oleh kabupaten Tanah Datar sekolah terakreditasi “A” sebanyak 14 sekolah dan terakreditasi “B: sebanyak 2 sekolah. Posisi ketiga jumlah sekolah terakreditasi “A” ditempati oleh kabupaten Pesisir Selatan bersama kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 10 sekolah., untuk kabupaten Tanah Datar terdapat 2 sekolah terakreditasi”B” dan 1 sekolah untuk kabupaten Lima Puluh

Kota. Sisanya yang paling banyak adalah sekolah dengan peringkat terakreditasi “C” dan belum terakreditasi.

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tentunya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan social di tengah masyarakat, karena sekolah merupakan bagian dari system kelembagaan social yang menjadi barometer bagi terjadinya proses internalisasi nilai-nilai budaya di tengah masyarakat. Apabila kejadian tindak pidana di tengah masyarakat masih terus meningkat, maka dapat dikatakan institusi pendidikan seperti sekolah ini menjadi kunci untuk mengontrol terjadinya kejadian tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk mengurangi tindak kejadian pidana di tengah masyarakat maka pendidikan karakter di sekolah yang pada gilirannya akan tertular dalam pergaulan di tengah masyarakat akan berdampak menjadi lebih baik, sehingga kejadian tindak pidana akan berkurang dengan sendirinya. Hal ini merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, karena warga sekolah merupakan contoh perilaku tauladan di tengah masyarakat baik melekat pada diri guru dan siswanya di tengah lingkungan sosialnya.